

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan publik dalam menjalankan kegiatannya tidak dapat dilepaskan dengan penerapan *Good Governance*. Secara umum *Good Governance* merupakan tata laksana pemerintahan yang baik sehingga terhindar dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan maupun tindakan yang mengacu pada tindakan kecurangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki prinsip-prinsip diantaranya profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penting bagi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena sektor publik pada dasarnya tidak berorientasi pada profit melainkan pelayanan. Program-program yang dilaksanakan dalam sektor publik juga mengedepankan kepentingan bersama dan pendanaan dari setiap programnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua prinsip dalam *Good Governance* penting untuk diterapkan, namun akuntabilitas memiliki peranan yang cukup sensitif jika dibandingkan dengan prinsip yang lainnya. Hal ini dikarenakan akuntabilitas mengacu pada pelaporan serta pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik.

Menurut Adisasmita (2011:30), akuntabilitas adalah suatu bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok maupun tujuan serta fungsi

organisasi baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh lembaga atau organisasi sektor publik memiliki beberapa dimensi. Menurut Mahmudi (2013:9), dimensi akuntabilitas dibagi menjadi lima dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah adanya laporan pertanggungjawaban yang baik antara pemberi dana dengan penerima dana. Laporan yang dibuat haruslah sesuai dengan ketentuan dan kebenaran dilapangan.

Universitas sebagai salah satu organisasi sektor publik juga harus menerapkan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan universitas juga menerima dana dari pemerintah pusat melalui berbagai program, khususnya program yang berhubungan dengan mahasiswa. Semua kegiatan yang melibatkan mahasiswa baik melalui organisasi kemahasiswaan maupun tidak melalui organisasi kemahasiswaan harus ada pertanggungjawaban yang baik didalamnya. Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 dalam BAB V tentang Pembiayaan menjelaskan bahwa dalam kegiatan kemahasiswaan harus ada akuntabilitas pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Ini dilakukan agar kualitas program yang dijalankan dapat dijamin dan pihak pelaksana dapat menentukan keberlangsungan program kedepannya. Mahasiswa sebagai penerima program harus mampu melakukan pertanggungjawaban dengan baik.

Pertanggungjawaban yang diberikan bisa berupa pertanggungjawaban kinerja (berhasil atau tidaknya program yang dijalankan) maupun pertanggungjawaban keuangan karena setiap program yang dijalankan pasti menerima pendanaan dari lembaga. Salah satu program di tingkat universitas yang ditujukan kepada mahasiswa adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan seperti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW).

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta yang terseleksi. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam berwirausaha. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, menyusun rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan usaha. Program ini diharapkan mampu menjadikan mahasiswa sebagai pengusaha yang tangguh dan sukses serta mampu bersaing dalam persaingan global. Selain itu, dalam program ini, mahasiswa juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan daripada berfokus untuk mencari pekerjaan. Universitas Pendidikan Ganesha sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia juga mendapatkan dana untuk melaksanakan PMW. Program ini ditujukan untuk melatih mahasiswa untuk berwirausaha dengan memberikan modal kepada mahasiswa agar mampu menjalankan usaha yang diusulkan sebelumnya dengan diawasi secara berkala oleh pihak universitas. Dalam prosesnya, mahasiswa yang programnya dinyatakan lolos berkewajiban untuk menjalankan usahanya dan melaporkan dana yang diterima. Pada tahun 2018 tercatat mahasiswa yang

menerima dana sebanyak 40 tim pengusul dan tahun 2019 sebanyak 39 tim pengusul dengan total dana sebesar Rp 150.000.000 disetiap tahunnya (Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Mahasiswa Undiksha, 2019).

Dana yang diberikan kepada mahasiswa dalam PMW bisa berbentuk dana hibah maupun dana bergulir. Dana hibah artinya mahasiswa diberikan modal untuk menjalankan usahanya dan ketika usahanya berhasil, mahasiswa tidak perlu lagi mengembalikan modal yang telah diberikan sebelumnya. Sedangkan dana bergulir artinya pada periode tertentu, ketika mahasiswa penerima dana PMW melaksanakan usahanya dengan baik, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan modal yang telah diterima sebelumnya. Modal tersebut kemudian akan dialokasikan kepada mahasiswa lain di tahun berikutnya. Meskipun diawal proses pendaftaran PMW dikatakan bahwa dana yang diberikan merupakan dana bergulir, nyatanya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan tidak ada keharusan untuk mengembalikan dana. Bahkan menurut pengakuan I Wayan Darnanta sebagai salah satu mahasiswa penerima PMW lolos didanai tahun 2018, mengatakan bahwa pengembalian dana tidak pernah dibahas dalam kontrak antara pihak universitas dengan mahasiswa penerima dana PMW dalam proses pencairan dana tersebut.

Meskipun dana yang diberikan merupakan dana hibah, bukan berarti bahwa dana yang diberikan bisa digunakan seenaknya dan tanpa adanya pertanggungjawaban. Mahasiswa tetap dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban yang baik atas dana yang diterima. Hal ini dikarenakan dana yang diterima berasal dari lembaga dan lembaga sebagai organisasi publik harus

menjunjung tinggi penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Disamping itu, pihak universitas melalui Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Mahasiswa (UPT PKK) Undiksha selaku panitia pelaksana PMW harus memastikan bahwa dana yang diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Sehingga dalam pelaksanaan PMW, mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan dalam dua tahap yaitu laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan kemajuan untuk melaporkan dana pencairan tahap pertama yaitu sebesar 70 persen dan laporan akhir untuk melaporkan dana pencairan tahap kedua yaitu sebesar 30 persen dari total pendanaan yang disetujui dimasing-masing tim. Dan jika tidak mengumpulkan laporan kemajuan ataupun laporan akhir, dana pencairan tahap kedua yaitu sebesar 30 persen tidak akan diperoleh oleh mahasiswa. Sehingga agar memperoleh pencairan dana secara penuh, mahasiswa harus membuat dan mengumpulkan laporan kemajuan dan laporan akhir.

Observasi awal telah dilakukan dengan mengunjungi kantor UPT PKK untuk melihat laporan penggunaan dana yang dibuat oleh mahasiswa penerima dana PMW pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Hasil observasi menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung tidak serius dalam pembuatan laporan penggunaan dana dan membuat laporan dengan seadanya. Banyak dari laporan yang tidak melampirkan dokumen transaksi seperti nota, faktur dan lainnya. Banyak juga dokumen dari laporan penggunaan dana PMW yang terlihat seperti dokumen fiktif karena tidak menyebutkan nama toko atau nama usaha yang jelas dari mana dokumen itu berasal. Format laporan yang dibuat pun masih belum seragam dan berbeda-beda bentuknya. Setelah didalami ternyata UPT PKK

memang tidak memberikan suatu format pasti kepada mahasiswa untuk membuat laporan dan menjadikan laporan tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan bagi pembuatan laporan di tahun berikutnya. Meskipun demikian UPT PKKМ tetap menetapkan suatu standar dalam pembuatan laporan bahwa laporan penggunaan dana PMW harus melampirkan dokumen transaksi yang menunjukkan bahwa dana tersebut telah digunakan dengan baik oleh mahasiswa. Sehingga temuan pada observasi ini bertentangan dengan standar yang dibuat oleh UPT PKKМ. Setiawan, (2013) yang menyoroti tentang fenomena pengelolaan keuangan daerah pada sebuah SKPD mengatakan bahwa tidak seluruh realita di atas kertas laporan sama dengan realita senyatanya di lapangan. Pada tahun 2018 terdapat salah satu tim yang tidak menerima pencairan dana tahap dua yaitu sebesar 30 persen karena tidak mengumpulkan laporan kemajuan seperti yang disyaratkan oleh UPT PKKМ selaku pelaksana PMW di Undiksha. Sehingga dengan melihat hasil observasi tersebut sudah sewajarnya jika akuntabilitas pengelolaan dana PMW di Undiksha masih diragukan kebenarannya.

Dilain sisi, peneliti juga telah melakukan obeservasi dengan mengikuti proses monitoring dan evaluasi di salah satu tim penerima dana PMW. Monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pengawasan dan pendampingan usaha yang dilakukan UPT PKKМ selaku panitia pelaksana PMW kepada mahasiswa penerima pendanaan PMW yang dilakukan dua tahap. Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak menyoroti tentang pelaporan dana yang dibuat mahasiswa atau pengelolaan dananya dan cenderung hanya berfokus pada pelaksanaan usahanya saja. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana PMW masih belum

ada di Undiksha. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentu akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dari dana PMW tersebut. Gonto (2011) mengatakan bahwa masih banyak mahasiswa yang nakal dan memperlakukan penggunaan dana PMW sehingga hal ini akan mempengaruhi jumlah dana yang diberikan di tahun berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tindakan kecurangan atau korupsi sudah terlihat atau dimulai dari bangku kuliah serta potensi korupsi, kolusi dan nepotisme bisa muncul dari kalangan organisasi kemahasiswaan itu sendiri (Beritajatim, 2019). Sehingga dari fakta tersebut perlu diungkap bagaimana pengelolaan dana PMW di Undiksha.

Jika ditelaah lebih lanjut, akuntabilitas bukan hanya sekedar pelaporan yang dilakukan oleh pihak penerima program kepada pihak pemberi program, melainkan terkandung konsep etika didalamnya. Hal ini sejalan dengan definisi akuntabilitas menurut Djalil (2014) bahwa akuntabilitas merupakan konsep etika yang dekat dengan administrasi publik. Jika dikaitkan dengan program PMW maka pelaporan yang dilakukan oleh mahasiswa haruslah akuntabel atau mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas didalamnya meskipun tanpa ada tuntutan dari UPT PKK. Selain itu, untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana tidak cukup hanya dilihat dari sisi pelaporan saja, melainkan harus ada dari sisi pelaksanaan usahanya sehingga akuntabilitas bisa dinilai dari dua sisi yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Dan jika dikaitkan dengan pengelolaan dana PMW, maka laporan yang dikumpulkan oleh mahasiswa haruslah diiringi dengan pelaksanaan usaha. Sehingga berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pelaporan yang dibuat oleh mahasiswa masih belum sesuai

dengan pelaksanaan usahanya, ini dibuktikan masih sangat jarang usaha rintisan PMW yang berjalan dengan maksimal.

Pihak UPT PKKM selaku panitia pelaksana PMW sering mengeluhkan akan pelaporan yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan pengelolaan dana PMW mulai dari tidak mengumpul laporan hingga laporan yang tidak dikumpulkan tepat waktu. Ini disampaikan oleh ibu Luh Putu Sudarmini selaku pegawai bagian administrasi di UPT PKKM pada saat peneliti melakukan observasi ke UPT PKKM. Hal ini diperparah dengan keberhasilan maupun pelaksanaan usaha yang belum maksimal. Dilihat dengan kasat matapun pelaksanaan PMW bisa dikatakan bermasalah karena adanya PMW belum berhasil menumbuhkan usaha-usaha baru yang dirintis sendiri oleh mahasiswa dari program PMW ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan program PMW belum sepenuhnya maksimal sesuai dengan tujuan awal dilaksanakannya PMW di Undiksha yaitu untuk menumbuhkembangkan usaha rintisan mahasiswa. Jika dibiarkan, maka kedepannya pelaksanaan PMW akan semakin tidak memiliki arah dan kedepannya sangat mungkin PMW tidak akan lagi dilaksanakan di Undiksha karena bisa dianggap tidak memiliki manfaat. Untuk itu, akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam pengelolaan dana PMW baik berupa akuntabilitas keuangan (berupa laporan yang akuntabel) maupun akuntabilitas kinerja (pelaksanaan usaha yang maksimal) dan pelaksanaan keduanya harusnya beriringan.

Mahasiswa memang telah memiliki jejak yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2015) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan mahasiswa masih terdapat sisi

remang yang terletak pada dokumen transaksi fiktif dan meninggikan jumlah pengeluaran pada laporan yang dibuat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Liana (2017) menunjukkan hasil bahwa mahasiswa tidak membuat suatu rencana pengeluaran keuangan dalam pengelolaan dana asrama sehingga berakibat pada tidak bisa melakukan *control* terhadap pengeluaran. Kebiasaan hidup royal yang dibawa sejak SMA dan pengaruh teman menjadi penyebab mahasiswa tidak bisa mengontrol pengeluaran. Penelitian oleh Saidah (2018) juga menunjukkan hasil bahwa dalam pengelola kinerja keuangan pengurus Lembaga Keuangan Mahasiswa (LKM) masih belum mampu menyusun anggaran dan dana kegiatan mahasiswa secara efektif dan efisien. Penelitian oleh Hidayati (2018) menunjukkan hasil bahwa dalam proses pelaporan terjadi tindakan kecurangan berupa pemalsuan tanda tangan, membuat dokumen transaksi fiktif dan membuat stempel palsu. Dalam hal PMW, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan program PMW belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hal yang sama juga mungkin terjadi di Universitas Pendidikan Ganesha.

Disisi lain terdapat penelitian yang memiliki hasil penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Irnayanti (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anggota senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) terlibat dalam pengelolaan keuangan baik dana internal maupun dana eksternal. Penelitian dari Purnami (2017) mengungkap bahwa pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa sudah melibatkan seluruh anggota sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan sehingga dapat dikatakan akuntabel. Selanjutnya penelitian dari Deni

(2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Perguruan Tinggi (KPT) memiliki keragaman dalam penyusunan laporan dan sebagian besar telah menrapkan akuntabilitas. Dan penelitian oleh Sambah (2019) dengan hasil penelitian bahwa dari 8 organisasi mahasiswa yang diteliti, secara keseluruhan sudah memberikan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Adanya hasil penelitian yang berbeda tentang pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa ini mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan mahasiswa khususnya di Undiksha perlu dilakukan. Terlebih lagi, penelitian yang sejenis yang menyoroti tentang pengelolaan dana PMW masih belum pernah dilakukan di Undiksha. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menyoroti tentang keberhasilan maupun kegagalan dari usaha rintisan PMW, dan dari segi pengelolaan keuangan penelitian terdahulu hanya berfokus pada organisasi kemahasiswaan saja. Sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian lainnya di Undiksha. Adapun penelitian sebelumnya yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian dari Wartika (2015) yang menyebutkan bahwa faktor keuangan menjadi penyebab kegagalan usaha PMW di Undiksha, yang bisa berarti bahwa pengelolaan keuangan PMW di Undiksha masih belum baik. Jika dibandingkan dengan penelitian dari Wartika (2015), penelitian ini lebih berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana PMW sedangkan pada penelitian Wartika (2015) mengungkap faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan usaha PMW di Undiksha sehingga tidak berfokus pada faktor keuangan saja. Dalam penelitian Wartika (2015) juga dikatakan bahwa cara pengelolaan keuangan oleh mahasiswa penerima dana PMW mempengaruhi kegagalan usaha yang dirintis

dari program PMW sehingga dalam penelitian ini peneliti akan lebih mendalami dan berfokus pada bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan PMW khususnya dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana karena dalam penelitian sebelumnya hanya mengungkap secara sekilas dan tidak berfokus pada faktor keuangan saja melainkan juga terdapat faktor lainnya seperti faktor kompeten dalam manajerial, faktor pengalaman, faktor perencanaan, faktor lokasi, faktor pengawasan, faktor sikap dan faktor peralihan/transisi. Berdasarkan hal itu, perlu diungkap bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dari mahasiswa penerima dana PMW di Universitas Pendidikan Ganesha didanai tahun 2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya mahasiswa penerima dana PMW masih kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang diterima. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya tim PMW yang tidak mengumpulkan laporan sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana yang diterima. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa laporan yang dibuat oleh mahasiswa masih belum baik karena masih banyak dari laporan yang dibuat belum melampirkan dokumen transaksi yang seharusnya dilampirkan dalam laporan tersebut seperti yang disyaratkan oleh panitia pelaksana PMW. Masih banyaknya kesalahan yang ditemukan dalam laporan penggunaan dana PMW disebabkan karena masih belum adanya pengawasan yang baik dari panitia pelaksana PMW. Adanya temuan tentang ketidaksesuaian laporan penggunaan dana yang dibuat oleh mahasiswa penerima PMW pada tahun 2018 dengan standar yang dibuat oleh UPT PKKM dan belum

adanya pengawasan yang baik atas pengelolaan dana tersebut, maka sudah sewajarnya jika akuntabilitas pengelolaan dana PMW didanai tahun 2019 diragukan kebenarannya. Terlebih lagi, penelitian yang menyoroti tentang pengelolaan dana PMW belum pernah dilakukan di Undiksha.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana dalam pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha oleh mahasiswa Undiksha. Peneliti ingin melihat akuntabilitas pengelolaan dana yang diterima oleh mahasiswa PMW didanai tahun 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Pendidikan Ganesha Didanai Tahun 2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan dana Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Pendidikan Ganesha Didanai Tahun 2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti ingin capai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperkaya konsep atau teori-teori dalam pengembangan keilmuan akuntansi khususnya akuntabilitas pengelolaan keuangan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana PMW di lingkungan Undiksha, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga untuk meningkatkan, memperluas, dan menerapkan ilmu yang dimiliki peneliti kedalam penelitian yang dilakukan.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan kesadaran bagi mahasiswa penerima dana PMW dan mendorong mahasiswa penerima PMW untuk menerapkan akuntabilitas dalam menjalankan program PMW.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi UPT PKK M Undiksha selaku panitia pelaksana PMW dalam pelaksanaan program PMW. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah wawasan pengelolaan dana PMW dan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan untuk dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penelitian karya ilmiah.